
ANALISIS SWOT PALANG MERAH INDONESIA (PMI) DALAM MELAKUKAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI KOTA PADANG

Andre Lofika Pegi

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
E-mail: andrepegi06@gmail.com

Zikri Alhadi

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
E-mail: ianunpzikri@yahoo.co.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze the strengths, weaknesses, opportunities and threats encountered by the Indonesian Red Cross (PMI) in carrying out disaster risk reduction in the city of Padang. The method used in this research is descriptive qualitative method with data collection techniques through interviews and field documentation studies. Data were analyzed using SWOT analysis theory. This study shows the results that the strength is that, PMI has the strength of personnel who are reliable and specialists in their fields, PMI has a stable procedure and system, PMI already has its own law, namely Law no. 1 of 2018 and Government Regulation No. 7 of 2019. The disadvantage is that PMI is a voluntary organization so that in carrying out its duties PMI cannot be too forced and not too binding, PMI does not have a budget for risk reduction making it difficult to carry out operational activities, infrastructure and equipment at PMI is inadequate, the quantity of PMI personnel still not enough. The opportunity that is owned by PMI in carrying out disaster risk reduction is that PMI has the trust of the government, PMI's name is quite good in government and society. The threat is that community participation is still lacking when conducting disaster risk reduction socialization activities, PMI is turned into political land by certain individuals from external PMI, causing internal conflicts and affecting PMI performance.

Keywords: SWOT analysis, PMI, disaster risk reduction

Submitted: 7 August 2019

Reviewed: 9 August 2019

Published: 14 August 2019

How to Cite: Andre Lofika Pegi dan Zikri Alhadi. 2019. *Analisis SWOT Palang Merah Indonesia (PMI) dalam Melakukan Pengurangan Risiko Bencana di Kota Padang*. 3(2): pp. 14-30. DOI: <https://doi.org/10.24036/jess/vol3-iss2>

Pendahuluan

Kota Padang terletak di Pantai bagian Barat Pulau Sumatera. Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat, salah satu kota yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Bencana menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2007

merupakan sesuatu peristiwa yang mengancam kehidupan masyarakat. Muis dan Khairil (2018) menjelaskan bencana adalah suatu peristiwa dikatakan bencana apabila peristiwa tersebut bersifat merusak dan menimbulkan kerugian pada masyarakat apabila suatu kejadian belum menimbulkan kerusakan dan kerugian maka belum bisa disebut bencana. Alhadi dan Siska (2014) dalam penelitiannya menyampaikan bahwa Kota Padang adalah salah satu wilayah atau kota yang paling pertama terkena gelombang bila diterjang bencana tsunami. Karena Kota Padang terletak di pantai barat pulau Sumatera memiliki letak astronomis antara 100°05'05" BT – 100°34'09" BT dan 00°44'00" LS – 01°08'35" LS berbatasan langsung dengan laut luas yaitu Samudera Hindia.

Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kota Padang tahun 2014-2018 tingkat risiko bencana di Kota Padang di jelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Tingkat Risiko Bencana di Kota Padang

No	Jenis Bahaya	Bahaya		Kerentanan		Kapasitas		Risiko	
		Indeks	Tingkat	Indeks	Tingkat	Indeks	Tingkat	Indeks	Tingkat
1	Banjir	0,755	Tinggi	0,727	Tinggi	0,445	Sedang	0,670	Tinggi
2	Gempa Bumi	0,537	Sedang	0,806	Tinggi	0,442	Sedang	0,622	Sedang
3	Tsunami	0,729	Tinggi	0,735	Tinggi	0,409	Sedang	0,667	Tinggi
4	Tanah Longsor	0,567	Sedang	0,556	Sedang	0,335	Sedang	0,590	Sedang
5	Kekerangan	0,654	Sedang	0,785	Tinggi	0,470	Sedang	0,647	Sedang
6	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	0,791	Tinggi	0,656	Sedang	0,342	Sedang	0,722	Tinggi
7	Cuaca Ekstrem	0,861	Tinggi	0,774	Tinggi	0,427	Sedang	0,732	Tinggi
8	Kebakaran Hutan dan Lahan	0,516	Sedang	0,689	Tinggi	0,414	Sedang	0,582	Sedang
9	Epidemi dan Wabah Penyakit	0,333	Rendah	0,773	Tinggi	0,302	Rendah	0,564	Sedang
10	Gagal Teknologi	0,662	Sedang	0,664	Sedang	0,302	Sedang	0,742	Sedang

Sumber : Kajian Risiko Bencana BPBD Kota Padang 2014-2018

Berdasarkan data table di atas dapat kita lihat peristiwa bencana di Kota Padang cukup tinggi Karena bencana merupakan sesuatu yang tidak bisa dicegah dan diduga kapan datangnya perlu adanya perhatian dari pemerintah dan masyarakat untuk menyusun tentang manajemen bencana manajemen bencana diartikan sebagai “suatu kegiatan yang terpadu, dinamis dan berkelanjutan, yang dilaksanakan semenjak sebelum kejadian bencana, pada saat atau sesaat setelah bencana hingga pasca bencana” Sadisun (2004). Menurut Alhadi (2014) manajemen bencana adalah

keterpaduan antara seluruh tahapan bencana dari pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Maka dapat disimpulkan manajemen bencana adalah serangkaian upaya yang bertahap dari prabencana, tanggap darurat hingga pasca bencana dengan tujuan untuk meminimalisir dampak dari bencana tersebut. Dalam tulisan ini yang menjadi fokus penelitian adalah untuk melakukan pengurangan resiko terhadap bencana. Salah satu strategi penting yang dilakukan sebelum terjadinya bencana adalah upaya pengurangan risiko. Pengurangan risiko bencana merupakan upaya yang dilakukan pada fase pra bencana atau pada saat sebelum terjadinya bencana. Pengurangan risiko bertujuan untuk mengurangi dampak kerusakan, kerugian dan korban jiwa yang disebabkan oleh bencana. Secara umum upaya pengurangan risiko disesuaikan dengan jenis dan karakteristik setiap potensi bahaya yang ada. Karena setiap daerah atau wilayah memiliki potensi bencana yang berbeda karena dipengaruhi oleh letak geografisnya masing-masing.

Beberapa langkah yang diambil dalam pengurangan risiko bencana secara garis besar terangkum dalam beberapa indikator yaitu; Pencegahan bahaya, Pengurangan Kerentanan, dan Peningkatan kapasitas. Untuk pelaksanaan pengurangan risiko bencana tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah sendiri, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau disingkat dengan BPBD, akan tetapi perlu adanya partisipasi dan keikutsertaan lembaga terkait serta peran lembaga non pemerintah dan masyarakat sehingga strategi dan tujuan dari penanggulangan bencana itu bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan yang di inginkan. Salah satu stakeholder yang sangat berperan dalam pengurangan risiko bencana ini adalah Palang Merah Indonesia (PMI). PMI merupakan organisasi semi pemerintah karena sudah memiliki Undang-Undang sendiri yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan kemudian juga dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2019.

PMI merupakan organisasi yang bersifat independen bertujuan mengurangi beban penderitaan manusia disebabkan oleh bencana alam, bencana social, wabah penyakit dan sebagainya. PMI juga merupakan suatu organisasi yang berada dibawah perlindungan pemerintah, PMI juga melakukan tugas kemanusiaan yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Organisasi PMI berada pada tingkat internasional, nasional, hingga ke provinsi dan sampai kepada kabupaten/kota hingga ketiap kecamatan. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2018 pada Bab 5 pasal 22 di jelaskan tugas PMI yaitu; a) memberikan bantuan kepada korban koflik bersenjata, kerusuhan, dan gangguan keamanan lainnya; b) memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; c) melakukan pembinaan relawan; d) melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kepalangmerahan; e) menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kepalangmerahan; f) membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana di dalam dan luar negeri; g) membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial; dan h) melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan oleh

pemerintah. pada penelitian ini akan membahas tentang tugas dan peranan PMI untuk membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana yang fokusnya adalah pengurangan resiko akibat bencana karena pada kenyataannya bencana tidak dapat dicegah akan tetapi dapat diminimalisir dampak atau resiko akibat dari bencana tersebut . kemudian di jelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2019 pada bab 2 pasal 4 ayat 1 dijelaskan bagaimana penyelenggaraan kepalangmerahan pada penanggulangan bencana oleh pemerintah dilakukan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Dalam penyelenggaraan kepalangmerahan PMI melakukan penanggulangan bencana pada setiap fase yaitu, fase pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana. Pada kali ini yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah pengurangan risiko bencana oleh PMI di Kota Padang..

Permasalahan yang dihadapi oleh PMI dalam pengurangan resiko bencana adalah ketika pelaksanaan program sosialisasi pengurangan resiko bencana kurangnya respon dari masyarakat, kemudian jumlah personil yang siap turun kelapangan masih minim karena hanya bersifat sukarela . permasalahan lain yang dihadapi PMI adalah kurang koordinasi dan komunikasi dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, baik itu koordinasi sesama anggota dan juga dengan lembaga atau organisasi lain yang sama-sama memiliki tugas terhadap penanggulangan bencana. Selanjutnya yaitu permasalahan tidak adanya anggaran dana untuk melakukan penanggulangan bencana, permasalahan berikutnya peralatan dan perlengkapan yang masih sederhana dan juga sudah mulai dimakan usia sehingga banyak peralatan tersebut yang tidak layak pakai. Terakhir PMI Kota Padang masih kekurangan logistik untuk penanggulangan bencana tersebut. Berdasarkan pada peristiwa gempa yang terjadi beberapa tahun yang silam dan bencana banjir yang terjadi setiap tahunnya, PMI Kota Padang turun langsung memberikan bantuan kelapangan untuk menyelamatkan korban bencana yang di mulai dengan pertolongan pertama pada korban bencana, pengungsian sampai pada kondisi sudah dinilai aman.

Dari penjelasan tersebut terlihat bagaimana vitalnya peran PMI dalam penanggulangan bencana dan perlu diperhatikan efektivitas kinerja PMI dalam penanggulangan bencana dan disini berfokus kepada pengurangan risiko bencana oleh PMI Kota Padang. Dengan demikian menjadi permasalahan ini menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Melihat Kota Padang merupakan salah satu kota yang memiliki potensi bencana yang sangat tinggi, maka pemerintah dan lembaga lainnya dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam pengurangan risiko bencana seperti mitigasi dan kesiapsiagaan, salah satu lembaga tersebut adalah PMI Kota Padang. Oleh sebab itu perlu dilakukannya analisis tentang kinerja PMI dalam pengurangan risiko bencana. Agar yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan manajemen bencana

itu tercapai sebagaimana mestinya. Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka penulis telah melakukan penelitian mengenai Analisis SWOT Palang Merah Indonesia (PMI) dalam Melakukan Pengurangan Resiko Bencana di Kota Padang dan penelitian ini juga bagian dari penelitian payung yang dilaksanakan oleh Zikri Alhadi (2018) dengan judul *Model Kebijakan Pengutan Disaster Risk Governance dalam Pengurangan Resiko Bencana Tsunami di Kota Padang*. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus rumusan masalah adalah apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan (SWOT) PMI dalam pengurangan risiko bencana di Kota Padang serta apa upaya PMI dalam mengatasi kelemahan serta ancaman dalam melakukan pengurangan risiko bencana di Kota Padang?

Tinjauan Kepustakaan

Analisis SWOT

Analisis SWOT pada dasarnya merupakan salah satu cara atau metode untuk mengetahui unsur internal dan eksternal yang ada di dalam sebuah lembaga atau organisasi yang sangat menentukan kemajuan dan pembangunan lembaga dan organisasi tersebut. Metode analisis SWOT bertujuan untuk mengevaluasi unsur internal dan eksternal yang ada dalam sebuah organisasi dan kemudian dapat pula di tentukan strategi selanjutnya untuk meningkatkan pembangunan dan kemajuan lembaga atau organisasi yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Analisis SWOT ini di dasarkan pada kondisi umum institusi bersangkutan baik yang bersifat internal maupun eksternal guna untuk mencapai tujuan serta visi dan misi yang telah ditetapkan semula oleh para pemangku kepentingan.. Dalam memahami SWOT ada empat faktor yang digunakan untuk menganalisisnya yaitu, Strength (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang) dan Threat (ancaman).

a. Kekuatan (Strength)

Pada dasarnya kekuatan adalah keunggulan atau potensi yang ada pada suatu daerah atau lembaga atau organisasi dan dilakukan perbandingan dengan daerah atau lembaga lainnya untuk melihat keunggulan yang ada tersebut. Kekuatan merupakan unsur positif yang terdapat pada internal suatu lembaga atau organisasi. Mengidentifikasi kekuatan biasanya dilihat dari pertama letak yang strategis, mudah di jangkau oleh alat transportasi, alat komunikasi yang memadai dan mendukung, adanya perlindungan hukum, sumber daya yang berkualitas serta peralatan dan prasarana yang lengkap dan juga memadai.

b. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan yaitu kekurangan yang ada pada suatu daerah atau lembaga tertentu dan dilakukan perbandingan dengan daerah atau lembaga lainnya yang sejenis. Kelemahan tidak boleh dibiarkan selama kelemahan tersebut dapat dilakukan

perbaikan karena kelemahan akan menghalangi suatu lembaga atau organisasi dalam mencapai tujuannya. Mengidentifikasi kelemahan sama juga dengan yang ada pada kekuatan akan tetapi kebalikan dari kekuatan tersebut. Seperti, letak yang tidak strategis jauh dari transportasi umum, tidak ada perlindungan hukum dari pemerintah, sumber daya manusia yang buruk, peralatan dan prasarana yang tidak lengkap dan juga anggaran dana yang tidak memadai.

c. Peluang (opportunities)

Opportunities dapat diartikan sebagai kesempatan dan kemungkinan yang tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Jika peluang dapat dimanfaatkan dengan baik maka akan mempermudah dalam pencapaian tujuan sehingga organisasi atau lembaga yang bersangkutan semakin baik lagi.

d. Ancaman (threat)

Ancaman diartikan sebagai suatu kondisi atau permasalahan yang datang dari luar dan menimbulkan kesulitan namun keberadaannya masih baru diprediksi belum tentu terjadi, ancaman dikawatirkan akan menyebabkan kendala atau tantangan yang cukup serius bagi suatu daerah atau institusi tertentu Sjahrizal (2014). Jika ancaman yang ada tidak ditanggapi dengan serius maka takutnya akan mengganggu jalannya organisasi dan lembaga dalam menjalankan tugas dan mencapai tujuannya.

Keempat unsur SWOT dapat dikelompokkan atas dua, yaitu faktor dari dalam (internal) dan faktor dari luar (eksternal). Unsur kekuatan dan kelemahan pada dasarnya adalah merupakan faktor internal yang berasal dari dalam suatu atau lingkup tugas (TUPOKSI) institusi tertentu. Sedangkan unsur peluang dan ancaman adalah merupakan faktor eksternal yang berasal dari luar atau ruang lingkup tugas tertentu tetapi berpengaruh terhadap masa depan lembaga atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan semula.

Dari keempat faktor Analisis diatas merupakan berasal dari pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, yang secara bersamaan juga dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman atau yang disebut dengan analisis situasi. Teori yang paling populer digunakan untuk analisis situasi adalah SWOT Rangkuty (2006).

Tabel 2. Tabel Matriks SWOT

	Kekuatan (Strengths-S)	Kelemahan (Weaknesses-W)
Peluang (Opportunities-O)	Strategi SO	Strategi WO
Ancaman (Threats-T)	Strategi ST	Strategi WT

Sumber : Freddy Rangkuti (2006)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa SO adalah memanfaatkan dengan maksimal seluruh kekuatan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, WO memanfaatkan kelemahan dengan memperhatikan peluang, ST adalah memanfaatkan kekuatan dengan memperhatikan ancaman, dan WT memanfaatkan kelemahan dengan memperhatikan ancaman.

Hasil kajian akan memberikan informasi tentang faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan pada suatu lembaga atau organisasi, jika kekuatan yang lebih tinggi dapat memberi sinyal untuk ditindak lanjuti perencanaannya sehingga mempermudah dalam mencapai tujuan. Di sisi lain jika ancaman lebih kecil tentu juga menjadi isyarat untuk pengembangannya untuk perlu ditindaklanjuti agar ancaman tersebut bisa dihindari dan tidak menghalangi lembaga atau organisasi yang menjadi objek analisis dalam mewujudkan tujuannya, Arjana (2016).

Pengurangan Resiko Bencana

Pada dasarnya bencana tidak dapat di cegah dan diketahui kapan terjadinya namun upaya yang dapat dilakukan adalah meminimalisir dampak kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh bencana tersebut dengan melakukan usaha pengurangan resiko bencana. Pengurangan resiko bencana merupakan suatu upaya yang dilakukan ketika sebelum bencana terjadi atau disebut dengan fase prabencana. Pengurangan resiko bencana dapat dilakukan sesuai dengan keadaan daerah atau wilayah. Menurut Shandra (2013) paradigma bencana mengalami pergeseran dari tanggap darurat bencana ke kepada pengurangan resiko bencana. Pengurangan resiko pada dasarnya penekanan pada tahap pencegahan dan kesiapsiagaan. Maka perlu adanya analisis yang matang perlunya analisis mengenai ancaman, tingkat kerentanan, kemampuan masyarakat, serta ketersediaan sumber daya baik itu manusianya maupun persediaan prasarana yang ada. Kemudian pelaksanaannya sesuai dengan ancaman bencana yang ada pada daerah tersebut. BPBD Kota Padang membagi strategi pengurangan resiko menjadi 4 macam yaitu, pencegahan. Kesiapsiagaan, mitigasi dan pengalihan resiko.

a. Pencegahan

Pencegahan yaitu pengelolaan sumber bencana sehingga tidak menimbulkan risiko. Upaya pencegahan bahaya lebih kepada pengurangan tingkat risiko yang akan muncul dengan melakukan pengelolaan pada lokasi sumber bahaya. Dengan adanya perlakuan di sumber bahaya maka diharapkan kejadian bencana dapat dihilangkan. Berbagai upaya yang dilakukan perlu dikondisikan dengan jenis bahaya yang berpotensi terjadi. Bencana yang tidak bisa dicegah seperti gempa bumi dan cuaca ekstrim dapat dikembangkan upaya lebih kepada upaya pengurangan kerentanan.

b. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan yaitu upaya penyelamatan diri (berfokus kepada komunitas) saat terjadi potensi bencana. Ketika terjadinya bencana maka masyarakat sudah mengetahui apa saja tindakan yang harus dilakukan, bisa dikatakan mereka sudah siap apabila bencana itu terjadi. Kesiapsiagaan didukung oleh sosialisasi tentang kebencanaan dan simulasi mitigasi bencana yang dilaksanakan kepada masyarakat sehingga masyarakat terlatih dan siap apa bila terjadi bencana. Tujuannya yaitu untuk mengurangi dampak korban jiwa apa bila bencana itu terjadi.

c. Mitigasi

Mitigasi, yaitu membangun penghalang (buffer) secara struktural ataupun non struktural yang mampu melindungi komunitas dari bencana yang mungkin terjadi. Secara umum mitigasi dapat dikelompokkan ke dalam 2 macam yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Mitigasi struktural yaitu upaya pengurangan resiko bencana berhubungan dengan usaha-usaha pembangunan konstruksi fisik. Sementara mitigasi non struktural yaitu upaya pengurangan resiko bencana dengan cara perencanaan tata guna lahan yang disesuaikan dengan kerentanan wilayahnya dan memberlakukan peraturan (law enforcement) pembangunan.

Hermon (2012) mengatakan bahwa Penguatan kelembagaan juga diperlukan dalam tahap mitigasi, karena penguatan kelembagaan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta merupakan faktor kunci suksesnya upaya mitigasi bencana. Perlu perhatian dan persiapan yang dilakukan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta yang dilakukan dalam mitigasi bencana.

d. Pengalihan Risiko

Pengalihan risiko yaitu komunitas menghindar sebelum bencana terjadi, atau membiarkan pihak lain yang menanggung risikonya (asuransi). Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana merupakan tanggung jawab semua pihak. Perka BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana, menyatakan bahwa dalam melaksanakan penanggulangan

becana di daerah akan memerlukan koordinasi dengan sektor. Adapun sektor yang dimaksud adalah sektor pemerintahan dan sektor non pemerintahan. Sektor pemerintahan terdiri dari sektor kesehatan, sektor sosial, sektor pekerjaan umum, sektor keuangan, sektor lingkungan hidup, dan lain-lainnya. Sedangkan sektor non pemerintahan terdiri dari masyarakat, swasta, lembaga non-pemerintahan, perguruan tinggi/lembaga penelitian, media dan lembaga internasional.

Lembaga-lembaga Non Pemerintah pada dasarnya memiliki fleksibilitas dan kemampuan yang memadai dalam upaya penanggulangan bencana. Dengan koordinasi yang baik, lembaga Non Pemerintah ini akan dapat memberikan kontribusi dalam upaya penanggulangan bencana mulai dari tahap sebelum, pada saat dan pasca bencana. Kerjasama antar pemerintah dan pihak-pihak non pemerintah merupakan suatu hal penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Pemerintah dapat membuka peluang sebesar-besarnya bagi perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat, sektor swasta, dan pihak-pihak lainnya untuk berpartisipasi aktif dalam pengurangan risiko bencana, termasuk dalam pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dan prakarsa-prakarsa serupa lainnya.

Pengurangan risiko merupakan kegiatan penanggulangan bencana pada fase prabencana. Pada pasal 7 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2019 dijelaskan penyelenggaraan kepalangmerahan pada penanggulangan bencana oleh PMI pada prabencana adalah; a) penyusunan rencana kontingensi bencana; b) melakukan advokasi dan sosialisasi tentang kesiapsiagaan bencana; c) membantu pembangunan masyarakat menjadi tangguh bencana; d) penguatan pusat data dan informasi PMI.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dilakukan di Markas PMI Kota Padang, Kantor BPBD Kota Padang, anggota Komisi IV DPRD Kota Padang yang gawaiannya juga tentang penanggulangan bencana kemudian dengan beberapa tokoh masyarakat yang ada di Kota Padang. Informan penelitian ditentukan dengan cara menggunakan teknik purposive sampling. Data yang dipakai dalam artikel ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan menggunakan triangulasi sumber. Sedangkan untuk teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Analisis SWOT Palang Merah Indonesia (PMI) dalam Melakukan Pengurangan Resiko Bencana di Kota Padang

Salusu (2015) menjelaskan Analisis SWOT merupakan suatu metode dalam penyusunan rencana strategik yang digunakan untuk melihat dan mengetahui faktor

utama yang mempengaruhi kegiatan di dalam suatu organisasi. Dalam penelitian ini, analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi empat faktor utama yang mempengaruhi kinerja PMI dalam melakukan pengurangan risiko bencana di Kota Padang. Empat faktor utama tersebut meliputi :

1. Kekuatan

Kekuatan yaitu faktor internal dalam bentuk situasi dan kondisi serta kemampuan atau keunggulan yang dimiliki oleh organisasi, hal tersebut memungkinkan organisasi memiliki keuntungan strategik dalam mencapai tujuannya. Dalam penelitian ini, kekuatan berarti kemampuan PMI Kota Padang yang bersifat positif dan berasal dari internal, yang memungkinkan PMI Kota Padang memiliki keuntungan strategik dalam melakukan pengurangan resiko bencana dan juga untuk memudahkan dalam mencapai tujuan pengurangan resiko tersebut. Kekuatan yang dimiliki PMI yaitu pertama PMI memiliki kekuatan personil yang handal dan spesialis dibidangnya masing-masing. Kedua PMI memiliki prosedur dan sistem yang sudah stabil, ketiga PMI juga sudah memiliki UU sendiri yaitu UU No 1 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2019. PMI juga sudah memiliki kelompok siaga bencana yang disebut Siaga Bencana Berbasis Masyarakat atau yang disingkat dengan SIBAT di 14 kelurahan di Kota Padang. SIBAT ini berfungsi sebagai perpanjangan tangan PMI dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang kebencanaan. Maka dari itu setelah di ketahuinya kekuatan yang dimiliki oleh PMI dapat di pertahankan dan ditingkatkan lagi sehingga mempermudah dalam pencapaian tujuan dalam melakukan pengurangan resiko bencana di Kota Padang yaitu mengurangi dampak, kerusakan, kerugian dan korban jiwa apabila terjadinya bencana.

Tabel 3. Daftar Kelompok Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT)

No	SIBAT/Kelurahan	Kecamatan
1.	SIBAT Kelurahan Baringin	Lubuk Kalangan
2.	SIBAT Kelurahan Indarung	Lubuk Kalangan
3.	SIBAT Kelurahan Limau Manis	Pauh
4.	Kelurahan Kalumbuk	Kuranji
5.	SIBAT Kelurahan Aia Pacah	Koto Tengah
6.	SIBAT Kelurahan Lubuk Minturun	Koto Tengah
7.	SIBAT Kelurahan Padang Sarai	Koto Tengah
8.	SIBAT Kelurahan Lubuk Buaya	Koto Tengah
9.	SIBAT Kelurahan Air Tawar Barat	Padang Utara
10.	SIBAT Kelurahan Purus	Padang Barat
11.	SIBAT Mata Air	Padang Selatan
12.	SIBAT Kelurahan Kampung Pondok	Padang Barat
13.	SIBAT Kelurahan Belakang Pondok	Padang Selatan
14.	SIBAT Kelurahan Cengkeh	Lubuk Bagalung

2. Kelemahan

Kelemahan adalah kekuarangan-kekurangan yang berasal dari internal PMI. apabila suatu kekurangan tidak ditanggulangi dengan baik maka akan menghambat dalam pencapaian tujuan. Kelemahan-kelemahan yang dimiliki PMI sering berubah-ubah. Selanjutnya kelemahan yang dimiliki Pertama organisasi PMI merupakan organisasi semi pemerintah salah satu fungsinya yaitu membantu pemerintah dalam melakukan penanggulangan bencana dan bersifat sukarelawan sehingga dalam melaksanakan tugasnya PMI tidak bisa terlalu dipaksakan dan tidak terlalu mengikat. kedua PMI tidak memiliki anggaran untuk melakukan pengurangan risiko sehingga cukup sulit untuk melakukan kegiatan operasional. Ketiga, prasarana dan perlengkapan di PMI belum lengkap. Berdasarkan dari hasil penelitian menyatakan perlengkapan dan peralatan yang dimiliki oleh PMI belum memadai jika dibandingkan dengan wilayah dan jumlah penduduk Kota Padang. Keempat dari segi kuantitas personil PMI hanya bersifat relawan sehingga personil atau relawan masih kurang, terutama yang stanbey di markas. Kelima pimpinan pengurus PMI selalu dari pejabat sehingga membuat PMI kurang dinamis dan sulit berkembang karena dalam pelaksanaan tugas sudah terbiasa dengan pola birokrasi yang berbelit-belit dan rumit. Keenam PMI bersifat kaku karena terfokus pada protap sedangkan yang ditemukan berbeda dengan kenyataan dialapangan.

Kemudian PMI sudah sangat jarang mengadakan pertemuan dengan SIBAT-SIBAT yang telah mereka bentuk di beberapa kelurahan, hanya mengandalkan grup WA untuk berkomunikasi dan itu kurang efektif dalam penyampaian informasi. Dalam menghadapi kelemahan tersebut perlu dicarikan solusi sehingga tidak menjadi penghambat dalam mencapai tujuan pengurangan resiko di Kota Padang.

Tabel 4. Daftar Pelengkapan Markas PMI Kota Padang

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Keterangan
1.	Mobil Ambulance	2 unit	
2.	Mobil Operasional	3 unit	
3.	Perahu karet	1 unit	
4.	Tenda Sanderbi	2 unit	
5.	Radio HT	6 buah	2 buah rusak
6.	Radio Ric Posko	3 buah	
7.	Radio Mobil	3 buah	
8.	Alat DU	1 set	
9.	Pelampung	10 buah	
10.	Tandu	4 buah	
11.	Tandu Spinal	4 buah	
12.	Tali Karamantel	1 gulung	
13.	Tas Pertolongan Pertama	3 set	
14.	Jas Hujan	5 buah	
15.	Computer	3 unit	
16.	Printer	3 unit	
17.	TV	1 unit	

3. Peluang

Peluang adalah faktor eksternal yang merupakan berbagai hal dan situasi yang menguntungkan bagi suatu organisasi serta kecenderungan kecenderungan yang merupakan salah satu sumber peluang. Dalam penelitian ini, peluang dilihat dari keuntungan yang mampu mendukung pencapaian tujuan pengurangan resiko bencana yang dilakukan di Kota Padang. Peluang juga diartikan sebagai kesempatan dan kemungkinan yang tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses kinerja suatu organisasi. Peluang yang dimiliki PMI dalam melakukan pengurangan resiko bencana yaitu, dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya PMI sudah bagus sehingga PMI mendapatkan kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat, nama PMI cukup bagus di pemerintah dan masyarakat. Adapun ketika kegiatan sosialisai yang diadakan oleh pemerintah, PMI selalu dilibatkan dan memiliki peranan penting dalam kegiatan tersebut.

4. Ancaman

Ancaman merupakan faktor eksternal yang merupakan faktor lingkungan yang tidak menguntungkan bagi PMI baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dalam penelitian ini, ancaman dilihat dari kendala kendala yang timbul

dari luar organisasi yang bersangkutan dalam melakukan pengurangan risiko bencana di Kota Padang. Ancaman yang dimiliki PMI yaitu: partisipasi masyarakat masih kurang ketika melakukan kegiatan sosialisasi tentang pengurangan risiko bencana, kemudian PMI juga dijadikan lahan politik oleh beberapa oknum tertentu dari pihak eksternal PMI sehingga akan menyebabkan konflik internal dan tentunya mempengaruhi kinerja PMI itu sendiri. Selanjutnya PMI merupakan organisasi yang berjenjang dimulai dari tingkat pusat hingga ke daerah kabupaten/kota akibatnya PMI yang lebih rendah akan bergantung kepada PMI tingkat atasnya sehingga kurangnya kemandirian.

Pembahasan

Dari hasil temuan penelitian di atas maka dapat kita lihat dalam tabel berikut ini kekuatan, kelemahan peluang dan ancaman yang dimiliki oleh PMI Kota Padang dalam melakukan pengurangan risiko bencana.

Tabel 5. Analisis SWOT PMI dalam Melakukan Pengurangan Risiko Bencana di Kota Padang

Kekuatan /Strengths(S)	Kelemahan / Weaknesses(W)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki personil yang handal dan spesialis di bidangnya masing-masing. 2. Memiliki sistem dan prosedur yang sudah stabil. 3. Memiliki UU No 1 Tahun 2018 dan PP No 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kpalang Merahan. 4. Memiliki Kelompok Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) di 14 kelurahan di Kota Padang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersifat kesukarelawanan sehingga tidak bisa mengikat. 2. Tidak memiliki anggaran dalam melakukan pengurangan risiko bencana 3. Sarana dan perlengkapan di PMI belum memadai. 4. Kuantitas dari anggota relawan yang masih kurang. 5. Kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat ketika kegiatan sosialisasi pengurangan risiko bencana. 6. Ketua dari pengurus PMI berasal dari pejabat sehingga kurang dinamis dan sulit untuk berkembang, karena sudah terbiasa dengan pola birokrasi yang berbelit-belit dan rumit. 7. Bersifat kaku dalam pelaksanaan tugas karena harus berdasarkan sesuai dengan protap yang sudah ditentukan 8. Pembentukan SIBAT tidak secara berkelanjutan hanya sebagai bentuk formalitas
Peluang /Opportunities (O)	Ancaman / Threats (T)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapat kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat karena dalam menjalankan tugas sudah dianggap bagus. 2. Nama PMI cukup bagus di mata pemerintah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi PMI dijadikan sebagai lahan politik oleh oknum yang berasal dari eksternal PMI. 2. PMI ketergantungan dan tidak ada kemandirian

Dari matrik diatas dapat dicarikan solusi untuk menghadapi kendala yang ditemui PMI dalam melakukan pengurangan resiko bencana di Kota Padang. Strategi atau Upaya merupakan serangkaian usaha untuk meningkatkan mutu kinerja dan kualitas individu maupun organisasi dalam mencapai tujuan. Untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas kinerja PMI dalam melakukan pengurangan risiko bencana di Kota Padang maka perlu adanya upaya sehingga tujuan dari pengurangan risiko itu dapat dicapai dengan baik.

Tabel 6. Matriks Analisis SWOT Strategi PMI dalam Melakukan Pengurangan Resiko Bencana di Kota Padang

	Kekuatan / Strengths (S)	Kelemahan / Weaknesses (W)
Peluang / Opportunities (O)	Strategi SO 1) Revitalisasi sarana dan prasarana. 2) Meningkatkan kinerja organisasi 3) Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi	Strategi WO 1) Revitalisasi sarana dan prasarana 2) Mengoptimalkan kegiatan sosialisai 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat 4) Menambah jumlah anggota relawan 5) Pemeberian anggaran dana dari pemerintah
Ancaman / Threats (T)	Strategi ST 1) Mengoptimalkan potensi organisasi PMI 2) Pengembangan kualitas organisasi.	Strategi WT 1) Meningkatkan kualitas relawan 2) Pengawasan dan evaluasi kegiatan 3) Meningkatkan kemandirian organisasi

Berdasarkan matrik diatas dapat diambil disimpulkan bagaimana upaya yang dilakukan oleh PMI untuk mengatasi kendala dalam melakukan pengurangan risiko bencana di Kota Padang.

1. *Open Recruitment* relawan baru apabila para relawan sudah mulai kurang aktif di PMI, memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada tim yang akan turun kelapangan untuk memberikan sosialisasi sehingga mereka lebih siap serta informasi yang disampaikan lebih padat dan berkualitas, menjaga komunikasi dengan *stakeholder* yang sama-sama bergerak di bidang penanggulangan bencana,
2. Melakukan pertemuan rutin dan berkala untuk menjaga komunikasi dan memudahkan koordinasi antar sesama *stakeholder* penanggulangan bencana, kemudian
3. Mengimbau kepada masyarakat agar selalu berpartisipasi ketika kegiatan sosialisasi ataupun simulasi yang diadakan oleh PMI maupun *stakeholder* penanggulangan bencana lainnya.

4. Memberikan dana hibah yang memadai kepada PMI untuk melakukan kegiatan operasional pengurangan resiko bencana atau bisa dianggarkan dari ABPN atau APBD sehingga dalam melakukan kegiatan pengurangan resiko bencana dapat secara optimal.
5. Menambah jumlah anggota relawan serta meningkatkan kualitas dan kapabilitas anggota
6. Melengkapi serana dan peralatan PMI dalam melakukan pengurangan resiko
7. Menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kesadaran dan berpartisipasi aktif dalam program pengurangan resiko bencana di Kota Padang. Karena yang menjadi objek dari program ini adalah masyarakat,

Penutup

Faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki PMI dalam melakukan pengurangan risiko bencana di Kota Padang dapat ditarik kesimpulan bahwa kekuatan PMI Kota Padang adalah pertama PMI memiliki kekuatan personal yang handal dan spesialis dibidangnya masing-masing. Kedua PMI memiliki prosedur dan sistem yang sudah stabil, ketiga PMI juga sudah memiliki UU sendiri yaitu UU No 1 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2019.

Kemudian kelemahannya adalah Pertama organisasi PMI merupakan organisasi semi pemerintah salah satu fungsinya yaitu membantu pemerintah dalam melakukan penanggulangan bencana dan hanya bersifat sukarelawan sehingga dalam melaksanakan tugasnya PMI tidak bisa terlalu dipaksakan dan tidak terlalu mengikat. Kedua PMI tidak memiliki anggaran untuk melakukan pengurangan risiko sehingga cukup sulit untuk melakukan kegiatan operasional. Ketiga, prasarana dan perlengkapan di PMI belum lengkap. Keempat dari segi kuantitas personal PMI hanya bersifat relawan sehingga personal atau relawan masih kurang terutama yang standby di markas. Kelima pimpinan pengurus PMI selalu dari pejabat sehingga membuat PMI kurang dinamis dan sulit berkembang karena dalam pelaksanaan tugas sudah terbiasa dengan pola birokrasi yang berbelit-belit dan cukup rumit. Keenam PMI bersifat kaku karena terfokus pada protap sedangkan kenyataan di lapangan cukup berbeda-beda. Selanjutnya PMI sudah sangat jarang mengadakan pertemuan dengan SIBAT-SIBAT yang telah mereka bentuk di beberapa kelurahan hanya mengandalkan grup WA untuk berkomunikasi dan itu kurang efektif dalam penyampaian informasi.

Selanjutnya peluang yang dimiliki PMI dalam melakukan pengurangan risiko bencana yaitu dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya PMI sudah bagus sehingga PMI mendapatkan kepercayaan dari pemerintah, nama PMI cukup bagus di pemerintahan dan masyarakat. Adapun ketika kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah, PMI selalu dilibatkan dan memiliki peranan penting.

Terakhir yaitu ancamannya adalah partisipasi masyarakat masih kurang ketika melakukan kegiatan sosialisasi tentang pengurangan risiko bencana, kemudian PMI juga dijadikan lahan politik oleh beberapa oknum tertentu dari pihak eksternal PMI sehingga akan menyebabkan konflik internal dan tentunya mempengaruhi kinerja

PMI itu sendiri selanjutnya PMI merupakan organisasi yang berjenjang dimulai dari tingkat pusat hingga ke daerah kabupaten/kota akibatnya PMI yang lebih rendah akan bergantung kepada PMI tingkat atasnya sehingga kurangnya kemandirian.

Upaya yang dilakukan oleh PMI dalam melakukan pengurangan risiko bencana di Kota Padang adalah melakukan *open recruitment* relawan baru apabila para relawan sudah mulai kurang aktif di PMI, memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada tim yang akan turun kelapangan untuk memberikan sosialisasi sehingga mereka lebih siap serta informasi yang disampaikan lebih padat dan berkualitas, menjaga komunikasi dengan *stakeholder* yang sama-sama bergerak di bidang penanggulangan bencana, melakukan pertemuan rutin dan berkala untuk menjaga komunikasi dan memudahkan koordinasi antar sesama *stakeholder* penanggulangan bencana, kemudian mengimbau kepada masyarakat agar selalu berpartisipasi ketika kegiatan sosialisasi ataupun simulasi yang diadakan oleh PMI maupun *stakeholder* penanggulangan bencana lainnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Hermon, Dedi. 2012. *Mitigasi Bencana Hidrometeorologi, Banjir, Longsor, Ekologi, Degradasi Lahan, Putingbeliung, Kekeringan*. Padang: UNP Press
- Maleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Rangkuty, Freddy. 2006. Analisis SWOT Teknik pembelahan kasus bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Salusu. (2015). *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Jakarta: Garuda.
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Era Otonomi*. Bandung: Rajawali Press

Jurnal

- Alhadi, Zikri. Kesiapan Jalur Dan Lokasi Evakuasi Publik Menghadapi Resiko Bencana Gempa Dan Tsunami Di Kota Padang (Studi Manajemen Bencana). *Humanus Vol. XIII No.1 Th. 2014*.
- Alhadi, Zikri dan Siska Sasmita. Kesiapsiagaan Masyarakat Kota Padang Dalam Menghadapi Resiko Bencana Gempa Dan Tsunami Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kesiapsiagaan Terhadap Resiko Bencana). *Humanus Vol. Xiii No.2 Th. 2014*
- Muis, Ichwan dan kharil Anwar. Model kesiap siagaan Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana Tanah Longsor di Desa Tugunukti Kecamatan Cisorua Kabupaten Bandung Barat. *Volume 3, Issue 4 Th 2018*

Wandasari, S. L. (2013). Singkronisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Mewujudkan Pengurangan Resiko Bencana. *Unnes Law Journal* 2 (2), 137-150.

Sumber Referensi dari Undang-Undang dan Dokumen

Kajian Risiko Bencana BPBD Kota Padang 2014-2018.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kepalang Merahan.

Peraturan-Pemerintah Republik Indonesia No 7 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang KepalangMerahan.